

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
(Study Empiris Kabupaten/ Kota Jawa Tengah)**



ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:
BOWO SETIAWAN
B 200090121

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**

PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini telah membaca Artikel Publikasi Ilmiah dengan judul:

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Study Empiris Kabupaten/Kota Jawa Tengah)

Yang ditulis oleh:

BOWO SETIAWAN

B 200 090 121

Penandatanganan berpendapat bahwa Artikel Publikasi Ilmiah tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Juni 2013

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a circle containing the initials 'ES', followed by a stylized signature and a small superscript '1'.

(Drs. Eko Sugiyanto, M.Si)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
(Study Empiris Kabupaten/ Kota Jawa Tengah**

Oleh:
Bowo Setiawan

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Study Empiris Kabupaten/Kota Jawa Tengah)”. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan realisasi APBD yang berupa jumlah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kabupaten/ Kota Jawa Tengah 2009-2011. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda melalui uji t. Sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik, uji F, dan uji koefisiensi determinasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 di bawah tingkat signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$); sehingga ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009 di bawah tingkat signifikansi 0,05 ($0,009 < 0,05$); sehingga ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Kata kunci : pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), belanja modal (BM).

PENDAHULUAN

Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Maryati, Ulfi dan Endrawati, 2010).

Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari Pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan (Mutiara Maimunah, 2006).

Semakin tinggi tingkat investasi modal di harapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2002).

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007).

Berdasarkan hal itu maka dilakukan penelitian dengan tujuan menguji pengaruh signifikan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan pengaruh signifikan dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan PAD yang sah (Nugraeni, 2011).

Darise (2006) menyatakan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

B. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No.33 Tahun 2004 berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari Dana Perimbangan, selain bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi khusus (DAK). DAU diterima oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan formula dan perhitungannya ditetapkan dalam undang-undang (Syukri dan halim, 2003).

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007).

C. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi (Halim, 2004).

Menurut Departemen Keuangan definisi belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu kerja bukan untuk dijual.

Menurut Pedirjen Pembendaharaan suatu belanja dikategorikan sebagai belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah
3. Perolehan aset tetap tersebut di buatkan bukan untuk di jual.

Dalam Belanja Modal ini termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangun, jaringan maupun dalam bentuk fisik lainya seperti buku, bintang dan lain sebagainya yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan.

1. Belanja modal Tanah yaitu semua biaya yang di perlukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif yang berhubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/ pembayaran ganti rugi tanah.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu jumlah biaya untuk pengadaan alat dan mesin yang di pergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap untuk digunakan. Dalam jumlah belanja ini termasuk biaya untuk

penambahan, penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin dan diharapkan dapat meningkatkan nilai aktiva serta seluruh biaya yang di perlukan.

3. Belanja modal gedung dan Bangunan yang termasuk dalam belanja ini adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan pembangunan gedung yang presentasinya mengikuti Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya untuk pembangunan gedung dan bangunan.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan yaitu biaya untuk penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan prasarana dan sarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi/ distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik intalasi/ distribusi.
5. Belanja Modal fisik lainnya adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perolehan melalui pengadaan/ pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan,irigasi) dan belanja modal non fisik, yang termasuk dalam belanja modal ini antara lain : Kontrak sewa beli, pengadaan/ pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro, 1999). Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen/ variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen/ variabel yang dipengaruhi.

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan variabel independen terhadap Belanja Modal yang merupakan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan dengan cara menguji variabel-variabel penelitian melalui pembentukan model analisis dengan prosedur statistik yang kemudian diambil interpretasi untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota Jawa Tengah tahun 2009-2011.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Sampel dalam penelitian ini adalah PAD, DAU dan Belanja Modal kabupaten atau kota Jawa Tengah tahun 2009-2011.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil adalah sampel yang memiliki kriteria-kriteria tertentu.

Jadi Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan realisasi APBD tahun 2009-2011 kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah, sehingga persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

β_2 = Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU)

PAD = Jumlah PAD

DAU = Jumlah DAU

e = error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pengujian statistik untuk Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal” terbukti kebenarannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal” penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah dalam memenuhi belanjanya. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, akan tetapi masih harus tergantung kepada pemerintah pusat. Karena pendapatan asli daerah yang diperoleh optimal dibandingkan dengan dana alokasi umum yang lebih besar sehingga untuk meningkatkan pelayanan masyarakat masih harus meminta bantuan dari pemerintah pusat. Dengan saran dan prasarana yang memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan infrastuktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha didaerah tersebut. Sehingga dengan banyaknya investor yang membuka usaha didaerah akan meningkatkan pendapatan daerah yang mana akan berdampak pada

belanja daerah yang meningkat pula. Semakin tinggi tingkat investasi modal mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat dari adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pengujian statistik untuk Dana Alokasi Umum diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan “Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal” terbukti kebenarannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harianto, dan Priyo Hari Adi (2007) melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan Perkapita”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum sangat berpengaruh terhadap belanja modal.

Mala, Lilik Khoirul (2008) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintah kabupaten/kota Jawa Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan penelitian ini dapat dijelaskan DAU dapat memberikan kontribusi cukup besar terhadap belanja modal dibanding PAD. Dengan

Kontribusi dana DAU yang besar dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Simanjuntak, 2001 dalam Christy dan Adi, 2009). Dibeberapa daerah peran dana alokasi umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah dana alokasi umum dari pada pendapatan asli daerah (Sidik, dkk, 2002 dalam Harianto dan Adi, 2007). Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer dana alokasi umum yang diterima daerah lebih besar. Semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan nilai t_{hitung} 6,728 dan p -value sebesar 0,000 ($p = 0,000 < 0,05$); sehingga H_0 ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.
2. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Dana Alokasi Umum dengan nilai t_{hitung} 2,674 dan nilai p -value sebesar 0,009 ($p = 0,009 < 0,05$); sehingga H_0 ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal.

3. Hasil perhitungan diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0,416 Hal ini berarti bahwa 41,6% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi kedua variabel independen yaitu dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. Sedangkan sisanya sebesar 58,4% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain diluar model.

Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan dapat mengambil sampel tidak hanya terbatas pada satu provinsi tetapi diharapkan ada beberapa provinsi, hal tersebut dimaksudkan agar dapat membandingkan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana Alokasi Umum terhadap alokasi Belanja Modal.
2. Variabel yang digunakan yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain.
3. Saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah penggunaan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah , Syukriy dan Abdul Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Dan Bali*. Jurnal SAN VI. Surabaya.
- Afrizawati. 2012. *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi, Vol. 2 No. 1
- Christy, F.A dan Prio Hari Adi 2009. "Hubunngan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia". Jurnal akuntansi halaman 1-6. Universitas Kristen Satya Wacana salatiga.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Jurnal SNA X. Makassar.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi keempat.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja PEMDA: studi kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal Ekonomi STIE. No.2.
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress Pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK STIE YO. Yogyakarta. Hal:127-146
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Varians Atas anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota di Indonesia*. Disertai S3 Tidak di publikasikan. Msi-FE UGM.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba empat.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita*. Jurnal SNA X. Makassar.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE Yogyakarta, Vol. 1 Oktober.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera*. Jurnal SNA IX. Padang.
- Mala, Lilik Khoirul. 2008. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah*. Pustaka Universitas Islam Sultan agung. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansi & Manajemen. Vol 5. No.2. Hal 68-84.
- Nugraeni. 2011. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Akmenika UPY. Vol 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Riandasa, Anugerah Febrian. 2011. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (Dau) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) Pada Kota/Kabupaten Di Jawa Tengah*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Santosa, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Semarang: BP Undip.
- Sarangih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan daerah*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi
- www.djpk.depkeu.go.id
- Yuwono , Soni; Dwi Cahyo Utomo; Subeiry Zeni; Azzafiany. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya; Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Malang: Banyu Media